Peran Inklusi Keuangan Berkaitan dengan Produktifitas UMKM yang Menjadi Agen46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar

Tegar Wahyu Sutanto dan Tetty Widiyastuti
Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara
Jl. Mastrip No. 59 Blitar, 66111, Jawa Timur

Abstrak
Relatif masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa mengakses layanan jasa keuangan formal menjadi perhatian utama Bank Indonesia dan Pemerintah dengan mencanangkan program keuangan inklusif untuk meniadakan segala hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan formal.
Dengan adanya hal tersebut diharapakan inklusi keuangan melalui branchless banking mampu menyentuh sektor pedesaan baik level individu maupun organisasi yang bisa dalam bentuk UMKM, koperasi maupun yang lainnya dengan kapasitas yang belum bankable. Sehingga dengan adanya branchless banking dapat meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan.
Perekonomian daerah atau pedesaan pada umumnya ditopang oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perannya sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai jenis UMKM yang tersebar diseluruh wilayah
Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan termasuk di dalamnya UMKM. Secara makro, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang makin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Kata kunci : *Inklusi Keuangan, Branchless Banking,UMKM*

PENDAHULUAN

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusi menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Sebelumnya pada 2014, baru sekitar 36% orang saja yang memiliki rekening bank. Tiga tahun sebelumnya pada 2011 bahkan jumlah yang punya rekening hanya 20% saja. Prestasi ini mencuatkan Indonesia sebagai yang tercepat di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam hal penggunaan rekening untuk tabungan, Indonesia juga memiliki nilai

yang kuat, yakni 10 poin lebih tinggi dibanding rata-rata negara berkembang lain di dunia, 42% dari pemilik rekening menabung di institusi keuangan formal seperti bank maupun institusi keuangan mikro.

Bank Indonesia telah membuat sebuah kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan yang disebut dengan kebijakan keuangan inklusi. Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang menyasar orang-orang kelas menengah bawah. Jadi layanan keuangan di Indonesia tidak hanya untuk kelas menengah atas, tetapi juga kelas menengah bawah. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk finansial. Bank Indonesia memiliki sebuah indeks yang bertujuan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan yang disebut dengan IKI – Indeks Inklusi Keuangan. IKI terdiri dari tiga variabel utama yaitu akses *(access)*, penggunaan *(usage)* dan kualitas *(quality).*

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan keuangan inklusi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara senantiasa konsisten dalam usahanya untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat Indonesia, salah satu cara untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan keuangan inklusi yaitu dengan pembentukan program Agen46, yang mana Agen 46 ini merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka inklusi keuangan.

Masyarakat memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup transaksi pembayaran non-tunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, remitansi, dan asuransi. Layanan keuangan saat ini masih didominasi oleh perbankan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan dan pembayaran.Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibentuklah program keagenan, yang mana dalam program ini menggandeng pelaku UMKM untuk berpartisipasi sebegai penyedia layanan keuangn inklusi. Selain sebagai bentuk suatu pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang menyasar orang-orang kelas menengah bawah. Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah program *branchless banking* yang merupakan program inklusi keuangan yang didalamnya terdapat indeks keuangan inklusi (IKI) yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari tiga variabel utama yaitu akses *(access)*, penggunaan *(usage)* dan kualitas *(quality)* ini mampu meningkatkan produktifitas UMKM yang telah berpartisipasi menjadi Agen46 Bank BNI Kantor Cabang Blitar.

LANDASAN TEORI

Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk kemudian digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini yaitu :

1. Laila (2017) mengadakan penelitian dengan judul "Peran Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta" dengan variabel perkembangan modal UMKM, pelayanan, aksesbilitas, dan pendampingan. Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah akesbilitas berpengaruh positif terhadap perkembangan modal UMKM di Yogyakarta. Semakin mudah akses, semakin meningkatkan perkembangan modal UMKM. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil perhitungan Ha dan Ho dapat diterima.
2. Evi (2013), dengan jurnal berjudul "Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia" menghasilkan simpulan yakni

akses program inklusi keuangan berdampak signifikan terhadap pengusaha UMKM khusunya perempuan.

3. Novia (2015), dengan jurnal berjudul"Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia" menghasilkan simpulan bahwa perbankan syariah mampu menjadi garda depan dalam upaya pengimplementasian inklusi keuangan di Indonesia dengan berdasarkan pada data peningkatan aset dana pihak ketiga yang mengalami kenaikan 15% sampai dengan 45% pertahun, pembiayan 50.05% per tahun, CAR yang cukup baik sebesar 15% serta *non performance finance* yang dibawah 5%.
4. Rika (2016), dengan jurnal berjudul "Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM di Padang, menghasilkan simpulan bahwa perlu adanya suatu eduaksi literasi pada inklusi keuangan UMKM yang berkesinambungan dikarenakan berdasarkan indeks utilitas produk keuangan pemanfaatan produk keuangan perbankan sebesar 74% lebih besar dibandingkan dengan produk keuangan lainnya.
5. Azka dan Lukytawati (2016) dengan jurnal berjudul "Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia" menghasilkan simpulan bahwa korelasi antara inkulsi keuangan menggunakan indicator *bank z score* dan stabilitas sistem keuangan di Asia menunjukkan tingkat hubungan yang sedang, dan faktor-faktor yang secara signifikan, mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di Asia antara lain inklusi keuangan, GDP perkapita, *non-FDI capital flow* terhadap GDP (NFDI).
6. Anggita (2019) mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Surakarta" dengan variabel edukasi keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen dan pendapatan yang menghasilkan simpulan bahwa edukasi inklusi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM.

Pengertian Inklusi Keuangan

Kebijakan inklusi keuangan adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, "inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya". Menurut Bank Indonesia, 2014, strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi *financial inclusion.*

Visi, Tujuan, dan Strategi Inklusi Keuangan

Menurut Bank Indonesia (2014), visi nasional keuangan inklusif yaitu "mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia", dan berdasarkan visi tersebut maka inklusi keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa tujuan.

Kerangka Nasional Keuangan Inklusif dibangun di atas enam pilar yaitu :

1. Edukasi Keuangan
2. Fasilitas Keuangan Publik
3. Pemetaan Informasi Keuangan
4. Kebijakan/Peraturan yang mendukung
5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi
6. Perlindungan Konsumen

Indikator Keuangan Inklusif

Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah :

1. Ketersediaan / akses, yaitu mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan, yaitu mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
3. Kualitas, yaitu mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutan pelanggan.

Pengertian UMKM

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20. Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Pengertian Bank

Menurut Undang–Undang No.10 tanggal 10 November tahun 1998 pasal 1 ayat 2, "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan hajat hidup orang banyak.

Menurut penyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 31, "bank suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran". Dari kedua pengertian bank tersebut,

secara umum dapat diartikan bahwa bank merupakan badan usaha yang mempunya peran sebagai *financial intermediary,* yakni sebagai perantara antara *surplus unit* dengan *defisit unit*

Hubungan antara inklusi keuangan, bank, dan UMKM

Keberadaan inklusi keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekomomi ke level pertumbuhan yang berkualitas.Inklusi keuangan merupakan suatu sistem layanan keuangan yang didesain khusus bagi pemenuhan hak kalangan masyarakat yang tidak layak (*unbankable*) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan semakin produktif. Oleh karena itu, dalam salah satu upaya peran aktif dalam program inklusi keuangan, maka terbentuk Agen46 yang merupakan sebuah implementasi program aplikasi keuangan inlusif yang mana dengan adanya program ini,mampu atau tidak meningkatkan produktifitas UMKM yang menjadi dan bergabung dalam program keagenan ini. Adapun jika digambarkan pada alur hubungan hubungan antara inklusi keuangan, bank dan UMKM adalah sebagai berikut :

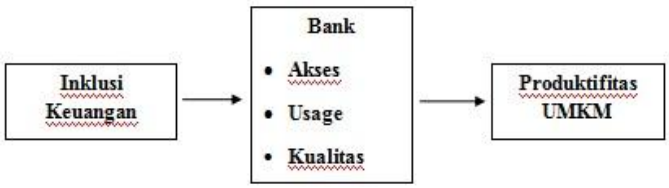

Gambar 1.
Hubungan antara inklusi keuangan, bank, dan UMKM

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penenlitian ini adalah semua data Agen46, transkasi dan produktifitas keagenan di BNI Kantor Cabang Blitar. Sampel yang digunakan adalah data produktifitas UMKM yang menjadi Agen46 di BNI Kantor Cabang Blitar tahun 2017 sampai dengan 2018, yang mana pada rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2018 ketentuan dan peraturan terkait dengan inklusi keuangan sudah ditetapkan dan tertata rapi dalam proses pengimplementasiannya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara
   Proses tanya jawab dan diskusi kepada pihak perusahaan dan UMKM yang menjadi Agen 46.
2. Dokumentasi
   Mendapatkan data semua catatan dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian di BNI Kantor Cabang Blitar.
3. Observasi
   Melakukan pengamatan di UMKM yang menjadi Agen 46 di BNI Kantor Cabang Blitar secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.
4. Data Sekunder
   Merupakan data internal perusahaan yang memuat tentang kinerja UMKM yang menjadi Agen 46 BNI Kantor Cabang Blitar.

ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Penelitian

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015. Adapun visi perusahaan yaitu "Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja"

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blitar beralamat di Jl. Kenanga No.7-9 Kepanjen Kidul Kota Blitar. Kantor Cabang Blitar mulai resmi beroperasi sejak tahun 1966. Saat ini jumlah karyawan yang ada di BNI Kantor Cabang Blitar berjumlah 68 pegawai atau sebesar 0.25% dari total keseluruhan jumlah pegawai BNI yakni 26.323 pegawai.

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketnggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan, arah tenggara dari Ibu kota Propinsi Surabaya. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km² Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km2 Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25′ – 112 20′ BT dan 7 57-8 9′51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 km dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, .

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki karakteristik yang hampir seragam (Kuncoro, 2007), ada 4 (empat) karakteristik yang dimiliki oleh kebanyakan UMKM di Indonesia:

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka

cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara bahkan rentenir.
2. Sebagian besar usaha ini belum memiliki status badan hukum. Hampir sepertiga UMKM bergerak pada kelompok usaha makanan, minuman, tembakau, kayu, bambu, rotan, rumput dan termasuk perabot rumah tangga.

Jumlah UMKM di Kota dan Kabupaten Blitar diperoleh hasil jumlah total keseluruhan jumlah UMKM yang ada di wilayah Blitar adalah sebanyak 24.186 pelaku UMKM dengan rincian Kota Blitar sebanyak 4.811 pelaku UMKM dan Kabupaten Blitar sebanyak 19. 375 pelaku UMKM. Wilayah Kabupaten Blitar mendominasi dari jumlah pelaku UMKM dikarenakan luas total wilayah Kabupaten Blitar lebih luas luas 48,76 kali jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Blitar. Dari keseluruhan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar sebanyak 24.186 pelaku UMKM yang telah bergabung dalam literasi keuangan program keagenan di BNI Kantor Cabang Blitar adalah sebanyak 907 pelaku UMKM dan yang aktif melakukan transaksi sebanyak 461 pelaku UMKM atau sebesar 50.83% dan 2.37% dari keseluruhan total jumlah UMKM yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.

Analisis Data

Gambaran umum responden

Responden yang telah dikelompokan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu jenis kelamin, usia pelaku UMKM dan bidang usaha yang ditekuni dan lama usaha UMKM dan Jumlah transaksi agen aktif. responden adalah laki-laki yaitu 15 orang dengan prsentase 44,12% dan perempuan berjumlah 19 orang dengan prsentase 55,88%. Usia pelaku UMKM yang menjadi responden penelitian ini berusia > 30 tahun. Usia tersebut menggambarkan bahwa usia >30 tahun merupakan usia yang produktif. Usaha yang ditekuni, dengan presentase usaha yang ditekuni responden paling sedikit adalah *Payment Point Online Bank* (PPOB) bersama dengan pelaku UMKM lainnya, sedangkan prsentase yang paling besar adalah pada industri perdagangan sebesar 94,12%.Lama Usaha dengan persentase lama usaha yang paling sedikit adalah 10-15 tahun dengan jumlah hanya 1 orang atau 2,94%, sedangkan persentase yang paling besar adalah 1-5 tahun sebanyak 18 orang atau 52,94%.

Jumlah transaksi untuk setiap kategori pelaku UMKM adalah yang mempunyai jumlah transaksi paling sedikit adalah akumulatif 1.000 (seribu) transaksi selama 1(satu) tahun periode. Dan dari hasil pemilihan responden, maka diperoleh hasil 34 pelaku UMKM yang memenuhi persaratan minimal jumlah transaksi ini, atau sebesar 3,7 % dari total jumlah pelaku UMKM yang bergabung menjadi Agen46 dan 7,8% pelaku UMKM yang aktif dalam keagenan.

Dari masing-masing indikator keuangan inklusif yang meliputi Ketersediaan / *akses, p*enggunaan / u*sag*e dan kualitas, berikut ini merupakan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan pengelompokan sesuai dengan jenis kategori responden

1. Ketersediaan akses

   Cara mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan produk dan layanan inklusif keuangan dalam bentuk Agen46, dari 34 pelaku UMKM, 100% seluruh responden menyampaikan bahwa, pelaku UMKM mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan produk dan layanan keuangan inkusif yang mana produk ini melipti produk perbankan baik produk tabungan, maupun pinjaman. .

   Dalam hal ketersediaan akses, pihak dari lembaga keuangan membantu sepenuhnya dalam proses pendirian keagenan dan berbagai macam syarat, yang mana keagenan yang semula harus memenuhi persyaratan *bankable*, kini literasi keuangan dalam betuk

keagenan bisa dilakukan oleh perorangan atau badan yang belum *bankable.* Belum *bankable* ini diartikan yakni, perorangan atau badan yang tidak menenuhi syarat administrasi, permodalan dan kapasitas usaha. Namun dari segi ketersediaan akses juga terdapat kekurangan yang menggangu pelaku UMKM untuk melakukan transaski keuangannya yaitu terkendala dengan akses yang terkadang sulit untuk dibuka.

2. Penggunaan / *usage*
   Dari keseluruhan responden memiliki penggunaan dari keagenan yang memiliki *usage minimal* 1.000 per tahun atau dengan rata-rata minimal sebanyak 83 transaksi setiap bulannnya dan jumlah usage tertinggi adalah 3.967 per tahun atau dengan rata-rata usage 330 transaksi tiap bulannya.
3. Kualitas
   Secara kualitas literasi inklusi keuangan pelaku UMKM dinilai mempunyai kualitas keamanan yang berlapis-lapis tercatat terdapat 4(empat) lapis *security accses* ynag mana meliputi, *password login, captcha identify personal identification number (PIN) dan PIN One Time Password (OTP)*, sehingga kemungkinan akses terjadi kebobolan secara sistema kualitas keamana rendah.
   Namun, 76,47 % dari 34 pelaku UMKM atau sebanyak 26 pelaku UMKM menyatakan bahwa kualitas akses keagenan ini kurang baik, seiring sering terjadinya *take down* akses *website* maupun seringnya *under maintenance,* sehingga menghambat akses pelaku UMKM ke website keagenan 46.
4. Produktifitas UMKM
   Dari segi produktifitas, inklusi keuangan ini menambah jumlah transaksi dan volume transaski serta perputaran modal yang cukup luar biasanya khusunya bagi pelaku UMKM, setidaknya lokasi milik pelaku UMKM bisa dikunjungi oleh konsumen sebanyak 83 kali selama tiap bulan bahkan hingga 330 kali selama setiap bulan, hal ini akan juga menambah peluang bisnis utama dari pelaku UMKM dilirik oleh para konsumen yang berkunjung ke lokasi pelaku UMKM.
   Selain dari jumlah dan volume transaksi yang bertambah, semakin tinggi tingkat *usage* dan *volume* transaksi, pelaku UMKM juga mendapatkan *fee* dari setiap masing-masing transaksi dilakukan. Hal ini tentunya juga berimbas pada laba yang diterima oleh UMKM setiap bulannya.

Penyajian Data

Data meliputi data *usage,* volume transaksi dan *cash flow* pelaku UMKM yang tergabung dengan Agen 46 BNI selama 1(satu) periode tahun 2018. Data *usage* tertinggi pada periode 2018 adalah dengan jumlah tansaksi 1.000 transaksi selama periode 2018 atau sebesar 83 transaski perbulan, dan transaksi tertinggi yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM adalah sebanyak 3.967 transaksi selama satu periode atau sebanyak 330 transaksi setiap bulannya.

Volume yang ditransaksikan oleh pelaku UMKM selama 1(satu) periode tahun 2018 tertinggi yaitu sebesar Rp. 818.706.600,- atau sebesar Rp.68.225.550,- per bulan, Sedangkan volume transaksi terendah selama 1(satu) periode tahun 2018 sebesar Rp.118.471.000,- atau sebesar Rp.9.872.583,- per bulan

Aliran uang kas operasional (*cash operation*) baik secara tunai maupun non tunai pelaku UMKM selama 1(satu) periode tahun 2018 tertinggi yaitu sebesar Rp.207.740.828,- dan terendah adalah sebesar Rp.2.529-. Rata-rata *cash operation* dai 34 responden pelaku UMKM selama periode 1(satu) tahun adalah sebesar Rp. 10.632.108,-. Aliran uang kas operasional ini berdarkan pada gambar 4.5 memiliki *trendline* yang menurun dan bahkan

cenderung sangat kecil, hal ini disebabkan oleh kecilnya *cash capital* yang dimiliki mempunyai *turn over* yang tinggi, sehingga tidak tercatat sebagai *iddle fund* (dana mengendap) yang cukup lama.

Pelaku UMKM lebih mengutamakan modal tunainya diperuntukkan untuk usaha utamanya, yaitu untuk perputaran barang modal yang memang dari seluruh responden 94,12% merupakan pelaku UMKM perdagangan, sedangkan keagenan46 merupakan usahan tambahan diluar usaha utama. *Cash operation* ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM tergolong kategori yang mana, termasuk usaha mikro, usaha kecil, ataupun usaha menengah, karena tiap kategori UMKM tersebut juga ditetukan oleh besaran jumlah modal usahanya.

Berbeda dengan perbandingan antara jumlah transaksi dengan volume transaksi yang mempunyai perbandingan lurus, dimana jika jumlah transaksi tinggi maka volume transaski juga akan ikut meningkat tinggi dan juga sebaliknya, maka c*ash operation* dari masing-masing pelaku UMKM ini mempunyai perbandingan yang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah transaski dan volume transaksi, bisa saja jumlah dan volume transaski meningkat tinggi, namun cash operation yang dimiliki cenderung rendah, ataupun sebaliknya, *cash operation* yang dimiliki tinggi, jumlah transaksi dan volume transaksinya cenderung rendah.

Dari sisi pendapataan yang diperoleh setiap pelaku UMKM tentunya juga berbanding lurus dengan jumlah transaksi, semakin banyak jumlah transaski yang dilakukan oleh tiap keagenan akan mendapat pendapatan yang juga seman]kin meningkat, pendapatan ini diterima dalam bentuk *fee* yang setiap jenis transaski memiliki jenis *fee* yang berbeda-beda besarannya. *Fee* yang diterima ini dalam bentu tunai yang akan dikreditkan setiap bulannya pada tanggal 5, yang besaran ini tentunya berbeda, fee yang diterima paling kecil diterima adalah Rp. 500,; sampai dengan Rp.15.000,- tergantung pada jenis transaksi yaang dilakukan oleh pelaku UMKM selaku Agen46.

Selain sebagai pendamping kegiatan bisnis utama dari bisnis utama pelaku UMKM, inklusi keuangan Agen juga berperan dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia, penyaluran bantuan seperti, Program Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Program Sembako Murah, Program Indonesia Pintar, dan yang terakhir Program kartu Pra Kerja, semua bisa dilakukan di inklusi keuangan keagenan yang dimilki oleh pelaku UMKM yang dipercaya untuk menyalurkan program-program pemerintah tersebut, semakin kepercayaan yang diperoleh keagenan semakin banyak, jumlah transaksi dan volume transaksi juga ikut meningkat, dan tentunya ini juga diperhitungkan sebagai produktifitas Agen46, dan tentunya juga mendapatkn *fee* atas transaksi yang dilakukan walaupun transaksi yang dilakukan ini merupakan program pemerintah. Hal ini lah yang juga menjadi penyebab melonjaknya pendapatan dari pelaku UMKM.

Jumlah transaksi merupakan seluruh transaksi baik itu tunai atau non-tunai yang dilakukan oleh pelaku UMKM selama 1 (satu) periode. Jumlah transaski paling tinggi yaitu sebanyak 3.967 transaksi oleh UMKM 1 yang beralamat di Wates Kabupaten Blitar, hal ini dikarenakan lokasi yang memang jauh dari akses perbankan atau lembaga keuangan selain itu juga didominasi usaha masyarakat sekitar adalah perkebunan tebu, sehingga masyarakat melakukan kegiatan keuangannya terpusat di agen UMKM Sedangkan Jumlah transaki terendah yaitu UMKM 34 dengan jumlah transaksi sebanyak 1.000 transaksi, UMKM ini berlokasi di Doko Kabupaten Blitar, transaksi yang paling sering didominasi di UMKM ini merupakan transaksi pembayaran yang mana dominan masyarakat ini memiliki kegiatan pertanian.

Volume transaksi merupakan jumlah nominal transaksi baik itu tunai atau non-tunai yang dilakukan oleh pelaku UMKM selama 1 (satu) periode. Jumlah transaski paling tinggi yaitu sebesar Rp. 818.706.600 oleh UMKM 1 yang beralamat di Wates Kabupaten Blitar, hal ini disebakan banyaknya jumlah transaksi pembayaran tebu dan juga bantuan program dari pemerintah seperti Bantuan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sedangkan untuk volume transaksi terendah yaitu Rp. 119.692.800, pada UMKM 30, yang mana berlokasi di Wlingi Kabupaten Blitar yang transaksinya didominasi penyaluran program pemerintah.

Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Edukasi Keuangan terhadap Pendapatan UMKM Hasil peran program inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap produktifitas pelaku UMKM yang turut serta dalam keagenan.
2. Pengaruh fasilitas intermediasi dan saluran distribusi terhadap produktifitas Fasilitas yang diberikan berupa program inklusi keuangan dari lembaga intermediasi, dan saluran distribusi berpengaruh positif terhadap produktifitas UMKM.
3. Pengaruh Layanan Inklusi Keuangan pada Sektor Pemerintah.
   Layanan inklusi di sektor pemerintahan sangat penting dalam menanggulangi, kemiskinan di Indonesia, peran pemerintah dalam beberapa prgram pemerintah seperti Program Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Program Sembako Murah, Program Indonesia Pintar, dan yang terakhir Program kartu Pra Kerja yang memberikan kepercayaan kepada program inklusi keuangan juga berpengaruh positif terhadap produktifitas pelaku UMKM peserta keagenan. Sehingga dari pendapatan yang diterima oleh pelaku UMKM bisa dijadikan sebagai tambahan modal untuk menyokong usaha utamanya.
4. Pengaruh tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan
   Dari segi sudut pandang *finacial* literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan Literasi keuangan (*financial literacy*) adalah hal penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik (*well literate*), akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Maka dari itu semakin paham pelaku UMKM memanfaatkan inkulsi keuangan maka akan dapat meningkatkan pendapatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisa data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman. Ketika literasi (pemahaman) diperoleh, maka pelaku UMKM akan tanpa ragu akan mudah memanfaatkan fasilitas akses yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan sebagai *financial intermediary* dalam bentuk inklusi keuangan keagenan, sehingga pelaku UMKM untuk memilih produk inklusi keuangan yang tepat untuk mengembangkan bisnis lain dari usahanya sehingga dapat menaikkan pendapatan dan modal untuk berusaha yang berkelanjutan.
2. Fasilitas yang diberikan berupa program inklusi keuangan dari lembaga intermediasi, dan saluran distribusi berpengaruh positif. Akses yang diberikan dalam program inkluasi keuangan, kualitas akses yang diberikan oleh perbankan berpengaruh positif

terhadap jumlah transaksi dan volume transaksi (*usage*) maka ini juga kana berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku UMKM.

3. Secara tidak langsung sektor pemerintah juga memberikan dukungan dan memberikan hasil postif atas program inklusi keuangan ini, terbukti pada beberapa program pengentasan kemiskinan.pemerintah lebih memilih. program keagenan yang merupakan program inklusi keuangan sebagai mitra penyalur dari pada lembaga kueangan seperti bank, koperasi dan kantor pos. Hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku UMKM yang turut serta pada program inklusi keuangan keagenan.
4. Bagi masyarat yang berada dilokasi yang tak terjangkau oleh lembaga keuangan formal seperti bank, mampu mengakses layanan keuangan yang setidaknya mampu memberikan fasilitas dan layanan keuangan seperti layaknya lembaga keuangan formal.
5. Indikator Keuangan Inklusif (IKI) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang didalamnya memuat 3(tiga) hal yakni ketersediaan atau akses, pengguanaan (*usage*), dan kualitas berpengaruh terhadap produktifitas pelaku UMKM yang menggunakan program inklusi keuangan dalam bentuk program Agen46 yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Saran

1. Bagi BNI Kantor Cabang Blitar, diharapkan mampu memaksimalkan pelaku UMKM yang telah mengikuti program inklusi keuangan keagenanini, yang mana dari 907 pelaku UMKM dan yang aktif melakukan transaksi sebanyak 461 pelaku UMKM atau sebesar 50.83% dan 2.37% dari keseluruhan total jumlah UMKM yang ada di wilayah Kabupaten dan KotaBlitar. Jika ini mampu dimaksimalkan maka akan berdampak positif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatanya dan bagi bank akan meningkatkan dana pihak ketiganya.
2. Sistem inklusi keuangan yang sering *down* dan *under maintenance,* merupakan kendala yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, jika ini berlanjut maka akan berdampak pada akses, penggunaan *(usage),* dan kualitas yang menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik dan pengembang program. Jika terus berlanjut, maka tidak hanya pendapatan pelaku UMKM yang menurun, namun tingkat minat masyarakat selaku pengguna program ini juga akan mengalami penurunan
3. Pelaku UMKM merupakan masyarakat biasa, dan bukan *banker* profesional di lembaga keuangan yang memeliki kode etik perbankan, oleh karena itu, tingkat pemahaman atas prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan data nasabah yang bertransaksi melalui program inkulsi keuangan keagenan tetap terjaga. Lebih baik pelaku UMKM dibekali lebih mendalam oleh lembaga keuangan yang berperan sebagai *financial intemrediary* dan saluran distribusi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, karena topik yang diangkat masih baru dan terus berkembang serta masihbanyak hal yang perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni. 2008. *Lembaga Keuangan.* Fakultas Ekonomi Univesitas Airlangga. Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. 2019. *Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. Blitar.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar. 2019. *Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2018*. Badan Pusat

Statistik Kota Blitar. Blitar

Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. Jakarta.

Budisantoso, T dan Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

Desiyanti, Rika. 2016. *Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM di Padang*. Universitas Bung Hatta. Padang.

Dienillah, Azka dan Lukywati Anggareni. 2016. *Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Dosen Perbanas Blog 2016. Perbanas Institute. Online. *https://dosen.perbanas.id/inkulsi-keuangan-money-inclusion.* Diakses tanggal 14 Januari 2019.

Hasibuan, Melayu SP. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Kasmir. S.E., M.M. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kelkar, Vijay. 2010. *Financial Inclusion for Inclusive Growth*. Administrative Staff College of India ASCI Journal of Management. India

Lukywati, Anggraeni. Dan Azka Azifah Dienillah. 2016. *Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Media Room 2016. Bank Indonesia. Online. *www.bi.go.id/inklusi keuangan.* Diakses tanggal 11 Januari 2019.

Nengsih, Novia. 2015. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Nurjannah, Laila. 2017. *Peran Inklusi Keuangan Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*.

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 2016.

Purwati, Yenny dan Rosaly Fransiska. 2014. *Strategi Peningkatan Kemampuan Adobsi Teknologi Branchless Banking Untuk Memperluas Inklusi Keuangan di Masyarakat Pedesaan*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Rubrik Finansial 2016. Finansialku.com. Online *www.financialku.com/apa-itu--inklusif-keuangan-dan-literasi-keuangan.* Diakses tanggal 18 Juni *2020*

Septiyani, Anggita Della. 2019. *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Surakarta*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.

Steelyana, Evi. 2013. *Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.

STIE Kesuma Negara Blitar. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Publikasi Ilmiah*. STIE Kesuma Negara. Blitar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

The World Bank. 2017. *The Global Findex Database 2017.* World Bank Group. Wahsington, DC.

Tjoekam, Moh. 1999. *Bisnis Inti Bank, Konsep dan Kasus.* Gramedia. Jakarta.

Yulianti,Praptini dan Ismail. 2006. *Modul Perbankan, Kredit dan Transaksi Jasa Perbankan.* Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya.